

**PERANAN SATUAN TUGAS KHUSUS KEJAKSAAN DALAM
PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

KURNIA DS

NIM : 10500113088

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurnia DS
Nim : 10500113088
Tempat/Tgl. Lahir : Sabbangparu, 17 Juli 1995
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : BTN Ranggong Blok A/11 No. 4 Makassar
Judul : Peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Dalam
Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan
Tinggi Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 27 Agustus 2017

Penyusun,

KURNIA DS
NIM : 10500113088

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "PERANAN SATUAN TUGAS KHUSUS KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN", yang disusun oleh Kurnia DS, NIM: 10500113088, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 24 Agustus 2017 M
9 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H, M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hamsir, S.H., M.Hum.	(.....)
Munaqisy II	: St. Nurjannah, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Ashar Sinilele, S.H., M.H.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt. karena dengan rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik serta salam dan shalawat penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kebaikan dan cahaya kepada umatnya.

Skripsi dengan judul **“Peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan selesainya skripsi ini, mudah-mudahan harapan dan keinginan penulis dapat tercapai.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari semua pihak. Penulis menyadari, selama dalam penyusunan banyak sekali kendala yang dihadapi oleh penulis tapi berkat bantuan, do'a dan dukungan yang ikhlas dari berbagai pihak sehingga kesulitan dan kendala yang ada dapat teratasi.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu :

1. Ayahanda Ambo Samang dan Ibunda Hadina yang telah memberikan dukungan, semangat dan do'a serta kepada saudaraku Wahyudi DS yang senantiasa memberikan semangat dan nasehat yang membangun, semoga apa yang kalian lakukan mendapat tempat yang indah dihadapan Allah swt.

2. Prof. Dr. H. Musafir Pabbari, M.si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. H. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Hamsir, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
6. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
7. Dosen dan seluruh Staf Jurusan Ilmu Hukum atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan di program Studi Ilmu Hukum, hingga saat ini.
8. Teman-teman angkatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, tiada harapan yang paling indah selain harapan bahwa apa yang penulis lakukan selama ini untuk penyusunan skripsi ini dapat bernilai positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bernilai ibadah disisi Allah swt. Amin.

Makassar, 24 Agustus 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	12
B. Tindak Pidana.....	25
C. Tindak Pidana Korupsi.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Metode Pengumpulan Data	44
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A.	Peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi	47
1.	Deskripsi Umum Tentang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	47
2.	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Telah di Tangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	51
3.	Tindakan Awal yang di Lakukan oleh Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi	53
4.	Peran Satuan Tugas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam Pengung- kapan Tindak Pidana Korupsi	64
B.	Faktor-Faktor Penghambat Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi	73
BAB V	PENUTUP	76
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
RIWAYAT HIDUP	97

ABSTRAK

Nama : Kurnia DS
NIM : 10500113088
Fakultas : Syariah dan Hukum / Prodi Ilmu Hukum
Judul : Peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Dalam penulisan Skripsi ini, peneliti membahas Peranan Satuan Tugas Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hal ini dilatarbelakangi oleh perkara tindak pidana korupsi yang sulit diungkap, karena para pelakunya merupakan orang yang berpendidikan dengan menggunakan cara-cara atau modus yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi.

Tujuan penulisan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi; 2). Untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan metodologi sebagai berikut : 1) Wawancara dengan pihak Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan khususnya yang bertugas untuk mengungkap tindak pidana korupsi. 2) Analisis data yaitu dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi, tidak terlepas dengan sinergitas Satuan Tugas Khusus dan bidang Intelijen di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang dilakukan untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, juga memiliki peranan ganda yakni mengungkap perkara tindak pidana korupsi dengan melakukan kegiatan penyelamatan kerugian keuangan Negara. Faktor yang menjadi penghambat Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi disebabkan pada perilaku hukum masyarakat terhadap anti korupsi, faktor sumber daya manusia, dan faktor pelacakan aset dalam mengungkap pelaku lainnya pada perkara tindak pidana korupsi.

Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan seharusnya menambah jumlah SDM yang masih kurang secara Kuantitatif dan Kualitatif dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi, sehingga banyaknya tugas yang harus diselesaikan, khususnya perkara yang mangkrak penanganannya, serta dapat berperan dengan baik sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*). Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang tidak boleh dilakukan. Menurut Achmad Ali¹ dalam bukunya menjelaskan bahwa:

“Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”

¹Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 30-31

Sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa:²

“hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak; undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; ketentuan, kaidah, patokan; keputusan hakim.”

Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum.

Dari berbagai macam kajian hukum, salah satu kajian yang sangat penting untuk dibahas lebih lanjut adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau kewajiban, bagi yang melanggar diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang melakukannya. Hukum pidana terbagi atas dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil yaitu mengenai petunjuk dan uraian tentang tindak pidana, sementara hukum pidana formil yaitu cara negara dengan perantara pejabatnya dalam menegakkan hukum materil. Perbuatan yang melanggar aturan inilah yang disebut dengan tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana

²Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (t.t: Mitra Pelajar, t.th). h. 175.

korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.

Berbagai peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.

Kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya merupakan orang yang berpendidikan dengan menggunakan cara-cara atau modus yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, tindak pidana ini sering disebut *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang cara pemberantasannya juga melalui cara-cara yang luar biasa.

Pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku menggunakan cara yang cerdik untuk menutupi kejahatannya yang saling melindungi. Kejaksan selaku lembaga negara memiliki tugas dan wewenang

untuk menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan, maka dibangun Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk mengungkap tindak pidana korupsi.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/ penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut

benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen Kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas dan melihat bagaimana peranan serta hambatan yang dihadapi Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, maka penulis terdorong untuk menulis penulisan hukum yang berjudul: ***“Peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan”***

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan tugas dan kewenangan satuan tugas kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Adapun yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengertian Peranan

Peranan adalah Serangkaian tindakan yang diharapkan oleh organisasi dan masyarakat tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan setiap organisasi atau lembaga tertentu.

Dengan demikian, makna peranan sangat memiliki relevansi dengan makna istilah pengaruh, karena peranan merupakan keniscayaan yang harus memiliki pengaruh tertentu. Bukan peranan, manakala tidak meniscayakan memiliki pengaruh tertentu.

2. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan RI adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan pada UU Nomor 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah serangkaian perbuatan dan peristiwa yang dilarang maupun memperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah serta dengan dukungan minimal dua alat bukti.

Perbuatan yang dapat dikategorikan suatu tindak pidana (*strafbarheid*) adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur secara kumulatif berdasarkan pengertian diatas, tidak terpenuhinya unsur sebagaimana diatas, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan perbuatan pidana.

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah serangkaian perbuatan untuk memperkaya diri, organisasi atau lembaga tertentu dengan cara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, baik dengan melakukan sesuatu maupun dengan tidak melakukan sesuatu yang berimplikasi merugikan keuangan Negara (pusat dan daerah).

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Tindak pidana korupsi harus dengan memenuhi unsur pengertian diatas secara kumulatif. Manakala tidak terpenuhi secara kumulatif, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana korupsi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi?

D. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran terhadap penelitian yang terdahulu telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Oky Riza Wijayanto, Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjarnegara, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2007. Fokus penelitian ini, yakni dengan memfokuskan pada peranan kejaksaan dalam hal menangani perkara tindak pidana korupsi di kabupaten banjar Negara. Sedangkan Fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni tidak memfokuskan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan memfokuskan peranan satuan tugas khusus kejaksaan tinggi sulawesi selatan dalam hal pengungkapan tindak pidana korupsi.
2. Neli Ernawati, Analisis Peran Kejaksaan dalam Penuntutan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2010. Fokus penelitian ini adalah dengan memfokuskan pada kajian Peran Kejaksaan dalam Penuntutan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri. Sehingga perbedaaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

memfokuskan pada peran satuan tugas khusus dalam hal pengungkapan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

3. Mario F. Gultom, Skripsi, Pelaksanaan Peranan Kejaksaan dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Medan), Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011. Fokus penelitian ini yakni dengan memfokuskan pada kajian Pelaksanaan Peranan Kejaksaan dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan peneliti, hanya memfokuskan penelitian dalam hal pengungkapan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel. Sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, memiliki perbedaan kajian dan wilayah penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya.
4. Erlita Ratna S, Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Malang), Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2014. Fokus penelitian ini, hanya memfokuskan pada proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang. Sehingga terdapat perbedaan fundamental dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni dengan memfokuskan pada Peran Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka Penulis dapat mengemukakan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis maupun secara teoritis.

a. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum khususnya hukum pidana terutama lagi yang berhubungan dengan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan.

b. Kegunaan teoritis

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para Pembaca terkhusus juga bagi Penulis mengenai pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi,

serta untuk mengkaji mengenai peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan
Tinggi Sulawesi selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan Pasal 2 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan pasal tersebut, Ladeng Marpaung¹ menyimpulkan bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.

¹Ladeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.191-192.

Sedangkan menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan Dr. Saheroji², menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa “Kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan.”

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang. Fungsi Kejaksaan mencakup:³

“Aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara

²Lihat dalam, Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. (Bandung: Widya Padjajaran, 2011). h. 196.

³Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, h. 190.

tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).”

Dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung

dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

2. Tugas dan wewenang

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari

pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggung jawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakkan hukum ;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan ;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara ;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama ;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta *statistic ciminal*.

Disamping itu, Kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

- Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh

hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

- Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

- Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

- Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;

- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Tertentu

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang Jaksa adalah bertindak sebagai Penuntut Umum dan sebagai eksekutor. Sementara tugas penyidikan ada di tangan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selain Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang melakukan penyidikan, Jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Misalnya dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.”

Menurut O.C. Kaligis⁴, bahwa sangat jelas kuasa Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut dalam perkara tindak pidana korupsi (satu atap), tidak dikendalikan atau dikontrol oleh siapapun dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, makna Pasal 26 tersebut mengenai penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan sudah baik dan benar.

⁴O.C. Kaligis & Associates. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. (Bandung: PT. Alumni, 2006). h. 129.

Selain melakukan penyidikan dan penuntutan, Kejaksaan juga dapat melakukan penyelidikan seperti yang dijelaskan oleh Wiyono⁵ bahwa “Dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Jaksa dengan sendirinya melakukan juga penyelidikan karena sebelum Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sudah harus didahului dengan melakukan penyelidikan.” Secara tegas Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, termasuk penyelidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang misalnya tindak pidana korupsi. Di samping Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, Jaksa juga mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan perkara pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Jaksa adalah melakukan penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP, misalnya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, jelas bahwa Jaksa memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana juga telah dijelaskan di atas dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Penjelasan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kewenangan kejaksaan untuk

⁵Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 170.

melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam undang-undang.

3. Peran Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum.

Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal
2. Peranan yang seharusnya
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.⁶

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan “*role performance*”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain. Sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi.⁷

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan dan peranan. Sebagai seorang penegak hukum merupakan pusat perhatian yang sudah pasti diarahkan pada peranannya. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain.

Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.13.

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h.15.

pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.

Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka Kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, penuntut umum tidak mengembalikan berkas maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirim lagi pada penuntut umum.⁸

Bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik sudah lengkap maka penyidik selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas barang bukti dan tersangkanya. Penuntut umum selanjutnya memeriksa hasil penyidikan dari penyidik apakah dapat dilakukan penuntutan atau tidak, bila dapat maka ia dalam

⁸Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004), h. 76.

waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebab surat dakwaan merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan terdakwa dalam sidang.⁹

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga untuk memperoleh pendefinisian yang sangat sulit. Biasanya tindak pidana disamakan dengan istilah delik. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Dalam bahasa Belanda dijelaskan bahwa:¹⁰

“*Straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, dan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.”

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Terjemahan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit* dan sebagainya.

⁹Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, h. 86.

¹⁰Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, h.5.

Pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. E. Utrecht menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
- c. Menurut Pompe perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- d. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan

¹¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, h. 5-7.

tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian yang mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹²

a. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*) ;
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
- c) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain ;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP ;

¹²Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 50-51.

e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum ;
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP ;
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Secara umum dikenal unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia yang dilakukan dengan kesalahan.
- b) Bersifat melawan hukum.
- c) Melanggar aturan hukum.
- d) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana (Delik)

Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, dipakai ukuran kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan kejahatan dengan pelanggaran secara kualitatif menurut Jonkers bahwa kejahatan pada umumnya termasuk

rechtsdelicten adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan perbuatan tersebut juga tidak adil menurut undang-undang. Sedangkan Pelanggaran yang termasuk *wetsdelicten* adalah perbuatan yang oleh masyarakat tidak dipandang sebagai perbuatan tercela yang pembuatnya harus dipidana, tetapi oleh pembentuk undang-undang ditetapkan sebagai delik untuk menjamin keamanan umum, memelihara dan mempertahankan ketertiban umum atau memajukan kesehatan umum. Sementara perbedaan kejahatan dan pelanggaran secara kuantitatif, bahwa kejahatan dipidana lebih berat dari pada pelanggaran.¹³

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materil yaitu tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan (Delik *Dolus*) dan Tindak Pidana dengan Kealpaan/Kelalaian (Delik *Culpa*)

Tindak Pidana dengan unsur kesengajaan (*delicht dolus*) merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan

¹³Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 352.

tindak pidana tersebut, termasuk mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan tersebut, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sedangkan tindak pidana dengan unsur kealpaan (*delict culpa*) merupakan tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian dari pelaku dan tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan tersebut, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

d. Tindak Pidana Aduan (delik aduan) dan Tindak Pidana Biasa (delik biasa)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan, misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif, karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367, ayat (2) dan (3)). Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut, diproses, dan dapat diadili walaupun tidak ada pengaduan, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

e. Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis*

Delik *omissionis* yaitu terjadinya delik dengan tidak melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan, misalnya mengetahui adanya permufakatan jahat tetapi tidak melaporkannya. Delik *commissionis* yaitu terjadinya delik dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana.

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang perumusannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur khusus dalam Undang-undang lain, misalnya tindak pidana korupsi.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan satu bentuk kejahatan modern. Sebagai kejahatan modern, dampak negatif yang ditimbulkannya tidak hanya mengancam keseimbangan negara, namun juga menodai prinsip keadilan, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, bahkan misi agama. Ketika agama datang mendeklarasikan prinsip keadilan, kejujuran dan penggunaan kewenangan sesuai fungsinya, tindakan korupsi justru melawan semua itu.¹⁴ Hal tersebut sebagaimana pada Q.S. Al Baqarah, (2): 30), detailnya sebagai berikut :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَحَنُۢنٌۭ نُّسِیۡحٌۭۙ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ ﴿٣٠﴾

Terjemahannya :

30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji

¹⁴Haidar Bagir, Korupsi Dari Perspektif Filsafat dan Etika Islam, dalam Nina Mariani Noor, Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi Dari Konsep ke Praktek di Indonesia, (Geneva: Globethics.net, 2015), h. 22

Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Korupsi, sebagai tindakan yang melewati batas moderasi, dapat menimbulkan dampak buruk, di antaranya, berupa kerugian pihak lain dalam bentuk pencurian harta publik. Di dalam sabdanya yang terkenal, Nabi menyatakan: "Tidak boleh menimbulkan bahaya/kerugian, dan tidak boleh membalas dengan bahaya/kerugian (serupa)" (*la dharara wa la dhirara*). Tindakan korupsi, dengan demikian, jelas berlawanan. Secara umum, korupsi termasuk bagian dari tindakan-tindakan destruktif (*fasad*) yang sangat ditentang oleh Islam.¹⁵ Hal ini sebagaimana yang telah diabadikan oleh al' Quran Q.S. Al Baqarah, (2) : 205), yakni :

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Terjemahannya :

205. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin: *corruption* adalah penyuapan, *corruptore* adalah merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi, berupa:¹⁶

¹⁵ Haidar Bagir, *Korupsi Dari Perspektif Filsafat dan Etika Islam*, h. 23.

¹⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, h. 8.

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran;
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korup (busuk, suka menerima uang suap uang/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
- c. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
- d. Koruptor, orang yang melakukan korupsi.

Menurut John M. Echols dan Hassan Shadaly, korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut A. I. N. Kramer SR mengartikan kata korupsi sebagai; busuk, rusak, atau dapat disuap.¹⁷ Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

¹⁷Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 6.

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi: busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata *corruptie* dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai penggunaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.

A.S. Hornby dan kawan-kawan, mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*). Sedangkan menurut David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.¹⁸

Keanekaragaman pengertian istilah korupsi seperti tergambar di atas, dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan

¹⁸Elwi Dani, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 4.

tentang apa yang dimaksud dengan korupsi sebagai suatu konsep. Dengan perkataan lain, keanekaragaman pengertian istilah korupsi dapat menimbulkan kesulitan dalam menarik suatu batasan yang serba mencakup tentang makna korupsi. Menurut Robert Klitgaard bahwa:¹⁹

“Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrument-instrumen kebijakan seperti soal tarif, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakkan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman, dan sebagainya. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor swasta, bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut.”

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai korupsi maka Peneliti dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan jahat yang dilakukan dengan cara penggelapan atau pun penyuapan secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara serta dapat merugikan kesejahteraan rakyat.

2. Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi

¹⁹Elwi Dani, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, h. 4-5.

Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri- ciri korupsi itu sendiri seperti ditulis Syed Hussein Alatas dapat membantu kita untuk memahami makna dari korupsi. Syed Hussein Alatas, mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:²⁰

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu;
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dan mereka yang melakukan tindakan itu;

²⁰Elwi Dani, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, h. 7-8.

- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.

Ciri-ciri di atas sebenarnya masih bisa diperluas, namun ciri-ciri tersebut sudah cukup dan dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan korupsi. Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa setiap perbuatan yang diklarifikasikan sebagai korupsi haruslah dibatasi dengan ciri-ciri tersebut, sehingga kita dapat menghindari pemahaman yang sempit tentang makna korupsi.

3. Peraturan yang Mengatur Tentang Korupsi

Korupsi diatur dalam beberapa undang-undang dan beberapa peraturan lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- h. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.
- i. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.
- k. Sejumlah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain:
 - Organisasi dan tata kerja KPK.
 - Pedoman pelaporan dan penetapan status gratifikasi.

Selain dari peraturan tersebut di atas, ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP ditemui pengaturannya secara terpisah di beberapa pasal pada tiga bab, yaitu:

- a. Bab VIII menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum, yakni pada Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP;
- b. Bab XXI tentang perbuatan curang, yakni pada Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP;

- c. Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yakni Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.

Mengenai pasal-pasal tersebut di atas sehingga dipandang sebagai tindak pidana korupsi akan dijelaskan lebih lanjut. Menurut Sudarto²¹ dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan- ketentuan yang mengancam dengan pidana orang-orang yang melakukan delik jabatan (Bab XXVIII), pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenaar*) yang bersangkutan-paut dengan korupsi ialah:

- a. Penggelapan (Pasal 415);
- b. Pemalsuan (Pasal 416);
- c. Menerima suap (Pasal 418,419,420);
- d. Menguntungkan diri sendiri secara tidak sah (Pasal 423, 425, 435).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Andi Hamzah²² bahwa yang termasuk delik korupsi adalah “delik jabatan tercantum dalam Bab XXVIII Buku II KUHP, sedangkan delik korupsi yang ada kaitannya dengan delik jabatan seperti Pasal 209 dan 210 (orang yang menyuap pegawai negeri atau lazim disebut *actieve omkoping*), berada dalam Bab II KUHP (termasuk kejahatan).” Victor M.

²¹ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Alumni, 2007), h. 117.

²²Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 38.

Situmorang²³ menjelaskan bahwa “kejahatan jabatan adalah kejahatan yang oleh pegawai negeri/pejabat dalam masa pekerjaannya dan kejahatan mana termasuk salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku kedua KUHP” sehingga pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan jabatannya dipandang sebagai tindak pidana korupsi.

Pasal 387 dan 388 KUHP juga dipandang sebagai tindak pidana korupsi karena telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 387 KUHP sudah diadopsi sampai bunyi pasalnya ke dalam Pasal 7 butir a UUPTPK (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan menghapus pasal ini dalam KUHP. Begitu pun dengan Pasal 388 KUHP juga sudah diadopsi menjadi Pasal 7 butir c UUPTPK dengan tambahan kata-kata: “Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia” dan ancaman pidana minimum dua tahun penjara maksimum tujuh tahun penjara dan denda minimum seratus juta rupiah maksimum tiga ratus lima puluh juta rupiah.²⁴

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa:

Pasal 2 ayat (1):

²³Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 56.

²⁴Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.124-125.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang;
- b. Melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (2): “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati, dapat dijatuhkan”.

Pada ayat (2) ini ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan delik korupsi atau pada waktu negara dalam krisis moneter.

Pasal 3:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang;
- b. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan;
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif dan empiris. Tipe penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum, buku dan peraturan perundang-undangan sedangkan tipe penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengenai peran sebenarnya di lapangan oleh Satuan Tugas Khusus Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, karena menurut peneliti Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah kejaksaan yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara- perkara tindak pidana korupsi, bahkan perkara pidana korupsi yang terjadi di daerah pun dalam Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Selain itu, Peneliti juga menilai bahwa sesuai dengan judul skripsi yang peneliti bahas yakni Peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Selatan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, maka Peneliti memandang perlu melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dan empiris (*applied law research*). Penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum, buku dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tipe penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi mengenai peran sebenarnya di lapangan oleh Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Kepustakaan (*Library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.
2. Wawancara, untuk menjaring data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini, khususnya pihak Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Selatan terutama Jaksa yang bertugas dalam pengungkapan dugaan perkara tindak pidana korupsi.

A. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah diolah berdasarkan 2 (dua) sumber data, yakni :

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dengan pihak Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan khususnya yang bertugas untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Data primer juga merupakan data yang memiliki tingkat dan reabilitas tinggi dalam memecahkan masalah yang dikemukakan dan didukung oleh data sekunder.
- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, buku-buku, tulisan, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deksriptif yaitu menjelaskan,

menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi

1. Deskripsi umum tentang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang mewilayahi 2 (dua) Propinsi yakni Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan membawahi 1(satu) Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, 6 (enam) Asisten dan 1 (satu) Kepala Bagian Tata usaha, 6 orang Koordinator serta 28 (Dua Puluh Delapan) Kejaksaan Negeri dan 9 (Sembilan) Cabang Kejaksaan Negeri.

Sedangkan jumlah pegawai secara kuantitas yang ada di Institusi Kejaksaan Tinggi Sulselbar yakni sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat

JUMLAH PEGAWAI				JUMLAH PEGAWAI	TENAGA HONORER		PEGAWAI DENGAN SURAT PERINTAH	TOTAL	KET.
JAKSA		TATA USAHA			L	P			
L	P	L	P						
61	58	52	41	212	13	20	33	245	-

Sumber : Lakip Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2016

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga merupakan instansi pelaksana putusan / penetapan Hakim dalam lingkup Pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga memiliki peran lain yakni dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan meliputi kegiatan :

(1) Di bidang pidana :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut

menyelenggarakan kegiatan :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia serta melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
- b. Membina aparatur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- c. Mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain;

- d. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;
- e. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain;
- f. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara;
- g. Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan tata usaha Negara, mewakili pemerintah dan Negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara;
- h. Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
- i. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, pengorganisasian Kejaksaan Republik Indonesia didasarkan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kejaksaan R.I. yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dengan Struktur Organisasi sebagai Berikut :

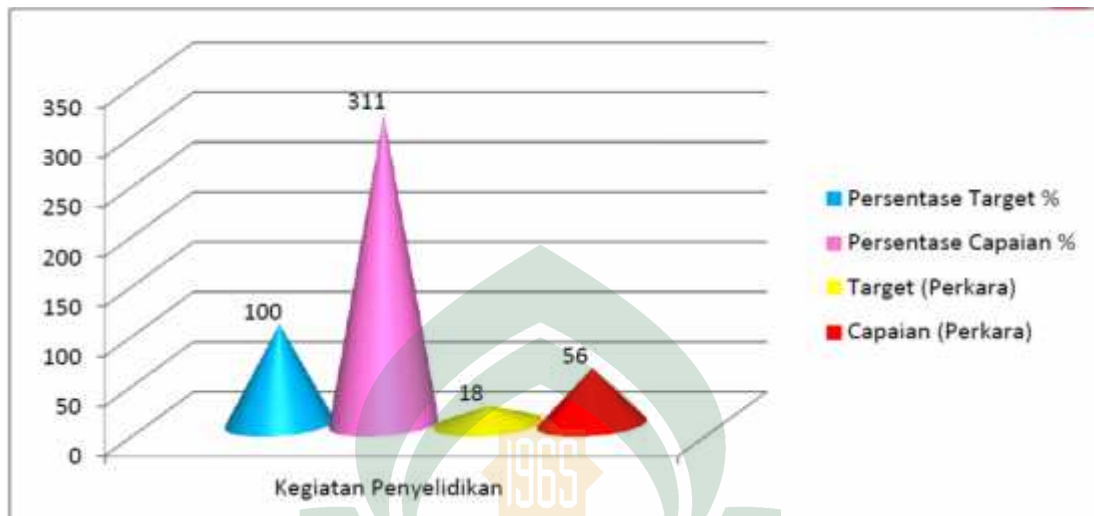


Dari struktur organisasi diatas, menunjukkan bahwa yang menangani perkara tindak pidana korupsi adalah Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan bekerja sama dengan Asisten Bidang Intelejen dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan dan barat.

2. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Telah Ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Berdasarkan dari Laporan Kinerja Tahunan oleh Institusi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2016, presentasi capaian melebihi dari capai target jumlah perkara di tahun 2016. Hal tersebut lebih detail dapat dilihat pada Tabel diagram di bawah ini :

Tabel Diagram 2. Capaian Kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi



Sumber : Lakip Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2016

Berdasarkan pada data diatas, bahwa sesuai dengan capaian target sebagaimana berdasarkan DIPA pada tahun anggaran 2016 sebanyak 18 perkara. Akan tetapi, pada realitasnya, realisasi penanganan perkara oleh kejaksaan tinggi Sulawesi selatan, telah mencapai 56 perkara, sehingga pencapaian prosentasenya sebesar 311 % (tiga ratus sebelas).

Dari hasil capaian tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi perkara yang telah ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan justru mengalami peningkatan dalam capaian menangani perkara tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan.

3. Tindakan Awal yang Dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pada hakikatnya, bahwa proses penanganan kasus di Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada bidang pidana khusus sama halnya dengan bidang pidana umum. Perbedaanya dalam pidana khusus, Kejaksaan dalam hal ini penuntut umum juga berwenang sebagai penyelidik dan penyidik, jadi tidak harus menunggu limpahan perkara dari Kepolisian. Kasus yang masuk dalam bidang pidana khusus antara lain meliputi kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), tindak pidana terorisme, tindak pidana ekonomi, dan penyelundupan dan tindak pidana lainnya yang masuk kategori tindak pidana khusus.

Tindakan awal yang dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi tidak terlepas dari peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari sistem pelaksana Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan dari hasil wawancara dari pihak Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada bagian Tindak Pidana Khusus¹, mengenai Tindakan Awal yang Dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut :

¹ Wawancara Pada Tanggal 13 Februari Tahun 2017 di kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Bahwa tindakan awal untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi di Sulselbar dengan beberapa tahap, yakni sebagai berikut :

- Laporan Masyarakat / Temuan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan itu sendiri;
- Pengecekan kebenaran informasi, setelah informasi tersebut di anggap benar dengan memenuhi fakta-fakta dan aturan yang ada maka di buatlah Renlid (Rencana Penyelidikan);
- Laporan Hasil penyelidikan (Sumber data/Keterangan, Barang bukti, Analisa, Kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi suatu tindak pidana khusus dan siapa pelakunya, sasaran tentang tindakan apa yang perlu di lakukan);
- Tahap penindakan (Pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan);
- Tahap pemeriksaan dst.

Sedangkan berdasarkan tahapan sebagaimana berdasarkan pada Hukum Acara Pidana dan sistem peradilan pidana, langkah-langkah yang ditempuh Satuan Tugas Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Tahap Penyelidikan

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan kewenangan pada tingkat penyelidikan. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) butir a KUHAP, penyidik memiliki wewenang yakni :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- Tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan dana yang tersedia dalam DIPA Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebanyak 8 Perkara, diselesaikan sebanyak 23 Kasus dan ditingkatkan ke Penyidikan Pidsus sebanyak 2 Kasus dengan capaian kinerja 287,5 %.

Salah satu perkara korupsi yang terungkap yakni pada kasus dugaan pelanggaran hukum atas Pengadaan Bibit Sambung Pucuk Kakao Dana APBN-P Tahun 2015 di Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Selatan dan dugaan kasus pelanggaran hukum tentang salah bayar dan *mark up* pada proyek pembebasan lahan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar PT. Angkasa Pura I (Persero) di Kab. Maros, bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan tim intelijen berpendapat bahwa penanganan kasus tersebut diserahkan ke Bidang Tindak Pidana Khusus untuk dilakukan penyidikan.

2. Tahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan, berdasarkan hasil wawancara kepada Bagian Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sulselbar², bahwa untuk mengungkap tindak pidana korupsi dengan tahapan sebagai berikut :

- Mengeluarkan surat Perintah Penyidikan (P-8) di mana menugaskan beberapa jaksa untuk melakukan penyidikan.
- Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.
- Pemanggilan saksi-saksi dan tersangka yang di buat dalam format surat biasa di sebut P-9 dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka Tipikor.
- Pemanggilan bantuan dari keterangan ahli (P-10) di mana dalam penyidikan dapat menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian.

² Wawancara dilakukan Pada Tanggal 7 Februari 2017 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

- Apabila berkas di anggap lengkap maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada JPU dan menyerahkan tanggung jawab tersangka dan Barang bukti kepada JPU dan selanjutnya masuk ke tahap penuntutan.

Berdasarkan pada Laporan Kinerja Tahunan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2016, bahwa kinerja konkrit bagian tindak pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahap penyidikan dalam upaya mengungkap perkara tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Kegiatan pelacakan asset terkait tindak pidana korupsi:

Dana yang tersedia dalam DIPA sebanyak 11 Laporan dan diselesaikan 11 Laporan, dengan capaian kinerja 100 %. Tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan Pelacakan Asset dari perkara tindak pidana korupsi, yakni sebagai berikut :

- 1) Adil Hands, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan/Penyyaluran Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM kepada KSP. Multi Guna Tahun 2011-2013 yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 4.122.000.000,-. Adapun hasil dari Asset Treacing berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Puri Taman Sari Blok C.3 No.8 Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini.
- 2) Andi Marwan, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan/Penyyaluran Pinjaman Dana Bergulir Dari LPDB-KUMKM TA. 2011-2013 Kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swadana Sebesar Rp. 7.000.000.000,-. Adapun hasil dari Asset Treacing berupa 1

(satu) unit rumah yang terletak di Jl. Talassalapang Komp. Perum Villa Talassalapang dan Kendaraan pada roda empat yaitu 1 (satu) unit Mini Bus Honda HRV warna putih tahun 2016 No.Polisi DD 289 SS.

- 3) M. Thamrin, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan/Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Dari LPDB-KUMKM TA. 2011-2013 Kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Niaga Sebesar Rp. 1.459.890.863,-. Adapun hasil dari Asset Treacing berupa Rumah di Perumahan Kompleks Anggrek AM No. 5 Minasa Upa Sungguminasa Kab. Gowa.
- 4) M. Iqbal, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan / Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Dari LPDB-KUMKM TA. 2011-2013 Kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Citra Niaga Sebesar Rp. 2.648.404.167,-. Adapun hasil dari Asset Treacing berupa Tanah dengan luas 192 M2, NIB 01201, Surat Ukur No. 00631 tanggal 29/05/2008 yang terletak di Kel./Desa Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan 1 (satu) Unit Sedan Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik tahun 2003, No. Polisi DD 550 D.
- 5) Gemawan Wibawa, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan/Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Dari LPDB-KUMKM TA. 2011-2013 Kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swadana Sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Adapun hasil dari Asset Treacing berupa 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jl. A.P. Pettarani III No. 15 Kota

Makassar, 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jl. Teduh Bersinar Perumahan Lagossi Home Blok E No. 4 Kota Makassar, Kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) unit mini bus Toyota new avanza 1.3G M/T warna putih tahun 2013, No. Polisi DD 1059 MM tahun pajak 29/01/2017, Kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) unit Honda Mobilio DD4 1.5E N-CVT CKD warna putih tahun 2014 No. Polisi DD 93 MA tahun pajak 11/08/2015, Kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC12A1CF A/T warna white silver tahun 2013 No. Polisi DD 4894 XK Tahun pajak 13/06/2017, dan Kendaraan roda dua atas nama Widya Kurniasari Rahim, ST yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF11B1D M/T warna merah tahun 2009 No. Polisi DD 2445 OB Tahun Pajak 13/09/2017.

- 6) Saksi Manopo, SP, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Bibit Sambung Pucuk Kakao pada Dinas Perkebunan Prop. SulSel TA. 2015 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 4.000.000.000,-. Adapun hasil dari Asset Treacing berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Dirgantara No. 58 B Kota Makassar, 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Bonto Cani No. B.2 Kompleks Pajak Kota Makassar, Kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) unit mini bus sedan grand livina 1.8 ultimate warna abu-abu tua metalik tahun 2008 No. Polisi DD 1010 SS tahun pajak 27/11/2016, Kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) unit Jeep Toyota Land Cruiser FJ40 warna hijau tahun

1962 No. Polisi DD 1494 AP tahun pajak 28/02/2012, Kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea C100ML warna hitam tahun 2001 No. Polisi DD 2350 UF tahun pajak 30/10/2010, Kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B2D1 M/T warna hitam tahun 2011 No. Polisi DD 3202 SS tahun pajak 26/05/2017, Kendaraan roda dua atas nama Yuspina, SE yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11C1CA/T putih beige tahun 2012 No. Polisi DD 6775 UI tahun pajak 29/11/2016, dan Kendaraan roda dua atas nama Christo Vernon Manoppo yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC11BF1CBA/T warna orange biru tahun 2013 No. Polisi DD 4421 XM Tahun pajak 15/04/2017.

- 7) Suryadi Razak, S.Sos, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan/Penyaluran Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM kepada KSP. Artha Niaga Tahun 2011-2013 yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 8.000.000.000,-. Adapun hasil dari Asset Treacing berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Aroepala Blok A No.2 Kota Makassar, 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 5 Kota Makassar (Samping Show Room Mercedes), 1 (satu) unit rumah kos-kosan yang terletak di Jl. Mapal Blok A3 Kota Makassar, dan 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Blok AC No. 5 Kota Makassar.

- 8) H. Abd. Rasyid. HP., dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Tanah dalam rangka Pengembangan dan Perluasan Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada PT. Angkasa Pura I TA. 2015. Adapun hasil dari Asset Treacing berupa Tanah dengan luas 600 M2, NIB 1205 yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab. Maros, 1 (satu) unit rumah yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab. Maros, Kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) unit sedan Honda city tahun 2012 No.Polisi 127 DR, dan Kendaraan roda dua atas nama Hj. Syamsiah yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda tahun 2013 No.Polisi DD 5994 TF.
- 9) HJ. ST. Rabiah, S.Pd., M.Pd, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Tanah dalam rangka Pengembangan dan Perluasan Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada PT. Angkasa Pura I TA. 2015. Adapun hasil dari Asset Treacing berupa Tanah dengan luas 385 M2, NIB 00293 surat ukur No. 00209 tanggal 20/10/2006 yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab. Maros, Tanah dengan luas 998 M2, NIB 00020 surat ukur No. 2900 tanggal 22/10/1997 yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab. Maros, Tanah dengan luas 668 M2, NIB 00058 surat ukur No. 2938 tanggal 22/08/1997 yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab.

Maros, Tanah dengan luas 1033 M2, NIB 00294 surat ukur No. 00210 tanggal 20/10/2006 yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab. Maros, Tanah dengan luas 2993 M2, NIB 01203 surat ukur No. 02926 tanggal 27/08/1997 yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab. Maros, Tanah dengan luas 1728 M2, NIB 1074 yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab. Maros, Tanah dengan luas 882 M2, NIB 1111 yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab. Maros, Tanah dengan luas 992 M2, NIB 1124 yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab. Maros, Tanah dengan luas 1571 M2, NIB 1130 yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab. Maros, Tanah dengan luas 2036 M2, NIB 1166 yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab. Maros, Tanah dengan luas 1206 M2, NIB 1266 yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab. Maros, Tanah dengan luas 1179 M2, NIB 1274 yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab. Maros, Tanah dengan luas 2000 M2, NIB 1275 yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab. Maros, Tanah dengan luas 769 M2, NIB 1284 yang terletak di dusun baddo-baddo kel. Baji mangngai kec. Mandai kab. Maros, 1 (satu) unit rumah yang terletak di dusun baddo-baddo desa baji mangngai kec. Mandai kab. Maros,

Kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift, Kendaraan roda empat atas nama ST. Hadriani Hasmawi yaitu (satu) unit mobil Honda jazz, dan Kendaraan atas nama H. Hasmawi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 110 (Shogun).

- 10) H. Raba Nur, S.Sos, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Tanah dalam rangka Pengembangan dan Perluasan Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada PT. Angkasa Pura I TA. 2015. Adapun hasil dari Asset Treacing berupa Kendaraan roda dua atas nama Fatimah yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tahun 2013 No. Polisi DD 5875 TC, Kendaraan roda dua atas nama Hendra Maulana Eka Saputra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tahun 2011 No. Polisi DD 3506 DR, dan Kendaraan roda dua atas nama Hendara Maulana Eka Saputra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda tahun 2013 No. Polisi DD 5630 TE.

- Kegiatan Pencarian dan Penangkapan Buron:

Dana yang tersedia dalam DIPA sebanyak 1 Kegiatan dan diselesaikan 1 Kegiatan, dengan capaian kinerja 100 %. Pada tanggal 02 September 2016 tim dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Melakukan pemantauan, pencarian, dan penangkapan tersangka atas nama YUDO BAHARI di Jakarta, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan/ Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM kepada KSP-

BERKAH BERSAMA Tahun 2011-2013 yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 3.000.000.000.

3. Penuntutan

- Membuat surat P-16A yaitu penunjukan JPU untuk menyelesaikan perkara tindak pidana
- Membuat Dakwaan dan segera dilimpahkan ke Pengadilan (P-31) dengan permintaan agar segera mengadili. Dan Apabila ketua pengadilan menyatakan berwenang untuk mengadili maka segera menentukan hari sidang

Dengan demikian, tindakan awal yang dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan dari hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa langkah awal untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi oleh Satuan Tugas Khusus oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, tidak terlepas dengan kewenangan yang luas sebagaimana diberikan berdasarkan Undang-Undang.

4. Peran Satuan Tugas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

- a. Melakukan Penangkapan Terhadap Tersangka Dengan Status DPO (Daftar Pencarian Orang)
 - 1) Tim penyidik pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap

tersangka dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan anggaran Praktikum TA.2013 dilingkungan kampus UIN Alauddin Makassar senilai *Rp.200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah)* atas nama Sofyan, S.Pdi., M.Pdi yang selama ini berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Bahwa penangkapan terhadap tersangka tersebut dilakukan di wilayah Kabupaten Gowa dan selanjutnya terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai tersangka Tim penyidik pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

- 2) Tim penyidik pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulselbar telah berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB senilai *Rp.5.498.000.000,- (lima milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)* yang bersumber dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 pada RSUD Regional Sulawesi Barat atas nama tersangka Awaluddin M. Hatma Als. Awal yang selama ini berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang).
- 3) Tim penyidik pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulselbar telah berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka An. Yudo Bahari, S.E. terkait dengan kasus Penerimaan /Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) Koperasi Simpan Pinjam

Berkah Bahari di Kab.Gowa senilai Rp.3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*). Bahwa penangkapan terhadap tersangka tersebut dilakukan di wilayah Jakarta Pusat dan selanjutnya terhadap tersangka langsung dibawah ke kantor kejaksaan tinggi sulawesi selatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai tersangka oleh Tim penyidik pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

- 4) Tim penyidik pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 tersangka An. Tenri Nur Irmawati yang selama ini berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang).
- b. Melakukan Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara

Bahwa kegiatan untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan Tinggi tidak hanya mengungkap pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi, juga melaksanakan penyelamatan kerugian keuangan Negara yang telah dikorupsi. Adapun penyelematan keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp. 30.621.401.318,57,- (*tiga puluh Milyar Enam ratus Dua puluh Satu Juta empat ratus satu Ribu Tiga ratus Delapan Belas Rupiah koma Lima puluh Tujuh Sen*) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Penyelamatan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebesar *Rp. 11.420.299.999,- (sebelas milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)*;
 - 2) Penyelamatan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar *Rp. 19.201.101.318,- (Sembilan belas milyar dua ratus satu juta seratus satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah)*.
- a. Melakukan Penelusuran Asset (*Asset Tracing*)

Bahwa dalam rangka mengungkap aliran dana perkara tindak pidana yang berguna untuk mengoptimalkan penyelamatan kerugian keuangan Negara dalam konteks penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, Tim Penyidik bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah bekerjasama membangun sinergitas dengan bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Adapun bentuk kerjasama dan koordinasi serta sinergitas yang dibangun dengan mengajukan permintaan bantuan penelusuran aset harta kekayaan (*Asset Tracing*) milik para tersangka kepada bidang Intelijen, yaitu antara lain :

- 1) Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah dalam rangka pengembangan dan penelusuran Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada PT.Angkasa Pura I (persero) Tahun Anggaran 2015;

- 2) Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) KSP.Dana Niaga Syariah dengan Dugaan Kerugian Keuangan Negara \pm Rp.14.685.254.253,- (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) Tersangka An.Andi Parihuddin,SE dan Andi Baso Abdullah,SE.
- 3) Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan /Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) KSP.Berkah Bahari dengan Dugaan Kerugian Keuangan Negara \pm Rp.3.000.000.000,- (*Tiga Milyar Rupiah*) Tersangka An.Yudo Bahari,SE.
- 4) Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Hidayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan Dugaan Kerugian Keuangan Negara \pm Rp.391.695.215,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*) Tersangka An.Sabnur;
- 5) Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Transaksi Keuangan yang mencurigakan atas nama Rusdi Karim (Bendahara Dinas

Pendidikan Kab.Gowa) tahun 2005 s/d 2011 dan bulan Januari 2015 s/d Desember 2015.

- 6) Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Lahan Pemukiman Transmigrasi di Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar TA.2015 dengan Dugaan Kerugian Keuangan Negara \pm Rp.16.000.000.000,- (*Enam Belas Milyar Rupiah*) Tersangka An.Muhammad Noor Uthary,SE., Sila Bin Laidi dan Risno Bin Patarai;
- 7) Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan /Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) KSP.Swadana dengan Dugaan Kerugian Keuangan Negara \pm Rp.3.000.000.000,- (*Tiga Milyar Rupiah*) Tersangka An.Gemawan Wibawa;
- 8) Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan /Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) KSP.Arta Niaga dengan Dugaan Kerugian Keuangan Negara \pm Rp.8.000.000.000,- (*Delapan Milyar Rupiah*) Tersangka An.Suryadi Razak,S.Sos.
- 9) Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan /Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB- KUMKM) KSP.Duta Mandiri dengan Dugaan Kerugian Keuangan Negara \pm Rp.7.000.000.000,- (*Tujuh Milyar Rupiah*) Tersangka An.Andi Marwan,S.Kom.

- 10) Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan /Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) KSP.Multi Guna dengan Dugaan Kerugian Keuangan Negara $\pm Rp.4.122.000.000,-$ (*Empat Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah*) Tersangka An.Adil Hands.
- 11) Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan /Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) KSP.Citra Niaga dengan Dugaan Kerugian Keuangan Negara $\pm Rp.2.648.404.167,-$ (*Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Empat Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) Tersangka An.Muh.Iqbal;
- 12) Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan /Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) KSP. Mitra Niaga dengan Dugaan Kerugian Keuangan Negara $\pm Rp.1.459.890.683,-$ (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) Tersangka An.M.Thamrin;
- 13) Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan /Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) KSP.Amar Sejahterah

dengan Dugaan Kerugian Keuangan Negara \pm Rp.2.686.669.223,- (*Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) Tersangka An.Nurhayati Syam.

- 14) Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Bibit Sambung Pucuk Kakao Pada Dinas Perkebunan Privinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dengan Dugaan Kerugian Keuangan Negara \pm Rp.4.000.000.000,- (*Empat Milyar Rupiah*) Tersangka An. Saksi Manopo,SP.
- b. Melakukan Penyelesaian Perkara Yang Menarik Perhatian Publik Selama Tahun 2016

Bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi selama Tahun 2016 ada beberapa Kasus yang menarik perhatian publik seperti :

- a. Perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Lahan Pemukiman Transmigrasi Desa Laikang Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2016 Yang dimana para Pelaku Tipikor seperti : Kepala Kecamatan dan Sekretaris Desa telah dijadikan Tersangka dalam Kasus ini.
- b. Perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana BergulirKoperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Multi Guna (LPDB-KUMKM) Tahun 2011-2013.

- c. Perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pengadaan tanah dalam rangka pengembangan dan perluasan terminal bandara internasional sultan hasanuddin makassar pada PT.Angkasa Pura I (persero) Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan dari uraian diatas, bahwa Peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Sulawesi selatan, menurut peneliti bahwa capaian Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam mengungkap tindak pidana korupsi, tidak terlepas dengan sinergitas Satuan Tugas Khusus dan bidang Intelejen di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan peran yang dilakukan untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi diluar dari target anggaran sebagaimana pada DIPA pada Instansi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagaimana pada tahun anggaran 2016 sebanyak 18 perkara. Akan tetapi, pada realitasnya, realisasi penanganan perkara oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan, telah mencapai 56 perkara. Selain itu, kinerja satuan tugas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak hanya melakukan peran pada mengungkap pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi juga memiliki peranan ganda yakni mengungkap perkara korupsi dan pembangunan Negara. Hal tersebut dapat dilihat pada peran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengungkap perkara tindak pidana korupsi dengan melakukan kegiatan penyelamatan kerugian keuangan Negara.

B. Faktor-faktor penghambat Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi

Dalam setiap pengungkapan tindak pidana sering ditemukan *obstacle* atau *proble*, hal tersebut merupakan suatu *fait accompli* dalam proses peradilan pidana khususnya proses pengungkapan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tahap yang dilakukan oleh penegak hukum yang merupakan bagian sub sistem pada *criminal justice system*. Begitu juga yang dialami oleh Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, berdasarkan dari hasil wawancara dari peneliti dengan Bagian Tindak Pidana Khusus, yakni Penyidik dan Bagian Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan³, ditemukan hambatan sebagai berikut :

1. Faktor Perilaku Hukum Masyarakat Terhadap Anti Korupsi

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peran masyarakat itu sendiri dalam melakukan upaya pencegahan, pengungkapan, dan pemberantasan pemberantasan korupsi merupakan faktor sulitnya pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut juga diperparah dengan sifat permisif yang dialami lingkungan masyarakat dalam hal ini pengungkapan dan pemberantasan korupsi.

³ Wawancara dilakukan pada Tanggal 10 Februari Tahun 2017 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Selain itu, Berdasarkan Laporan pelaksanaan Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari. Anti KKN dalam tahun ini tidak terlaksana dengan baik. Penerangan Hukum dalam Masyarakat dimana Tim Penyuluhan Hukum dalam tahun berjalan kurang memahami prosedur pelaksanaan Penguatan Jaringan Masyarakat anti KKN sehingga segala bentuk dari kegiatan tersebut mengalami peningkatan yang kurang efektif.

2. Faktor Sumber daya Manusia

Minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh institusi Kejaksaan Tinggi, baik secara kuantitatif dan secara kualitatif. Hal tersebut, dibuktikan dari hasil wawancara, bahwa hambatan dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi, karena pada tahap penyelidikan, khususnya pada tahap pengeledahan untuk mencari barang bukti dan alat bukti yang berupa dokumen, sangat rentang disembunyikan oleh pelaku yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

3. Faktor Pelacakan Aset yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Selain hambatan pada pengeledahan tersebut, hambatan yang lainnya yang sangat rentang dilakukan oleh terduga melakukan tindak pidana korupsi, yakni menyembunyikan segala asset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Sehingga menyulitkan oleh Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi, karena *trend* perbuatan korupsi tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja. Padahal, pengungkapan tindak pidana korupsi yang sangat urgen dilakukan adalah pelacakan asset dari pelaku tindak pidana korupsi. Pelacakan asset tindak pidana korupsi merupakan filosofi dari upaya

pengungkapan dan pemberantasan korupsi untuk mengembalikan keuangan Negara dari hasil tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara serta pelacakan asset juga berguna untuk menerapkan tindak pidana pencucian uang dan mengungkap *dader* (pelaku) lainnya pada perkara korupsi yang sama.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana yang telah dideskripsikan sebelumnya, peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, menurut peneliti bahwa capaian Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam mengungkap tindak pidana korupsi, tidak terlepas dengan sinergitas Satuan Tugas Khusus dan bidang Intelejen di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan peran yang dilakukan untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi diluar dari target anggaran sebagaimana pada DIPA pada Instansi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagaimana pada tahun anggaran 2016 sebanyak 18 perkara. Akan tetapi, pada realitasnya, realisasi penanganan perkara oleh kejaksaan tinggi Sulawesi selatan dan barat, telah mencapai 56 perkara. Selain itu, kinerja satuan tugas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak hanya melakukan peran pada mengungkap pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi juga memiliki peranan ganda yakni mengungkap perkara korupsi dan pembangunan Negara. Hal tersebut dapat dilihat pada peran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengungkap perkara tindak pidana korupsi dengan melakukan kegiatan penyelamatan kerugian keuangan Negara.

- b. Bahwa Faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi disebabkan dengan perilaku hukum masyarakat terhadap anti korupsi, faktor sumber daya manusia, dan faktor pelacakan aset dalam mengungkap pelaku lainnya pada perkara tindak pidana korupsi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar menambah jumlah anggota dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi sehingga dapat ditangani dengan cepat karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan, khususnya perkara yang mangkrak penanganannya. Sedangkan jumlah SDM masih kurang secara Kuantitatif dan Kualitatif.
2. Diharapkan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar dalam hal penegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terutama Satuan Tugas Khusus dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi serta dapat berperan dengan baik sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011).
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2011).
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Elwi Dani, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Haidar Bagir, *Korupsi Dari Perspektif Filsafat dan Etika Islam, dalam Nina Mariani Noor, Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi Dari Konsep ke Praktek di Indonesia*, (Geneva: Globethics.net, 2015)
- Ladeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- O.C. Kaligis & Assocites. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. (Bandung: PT. Alumni, 2006).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Alumni, 2007).
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004).
- Teguh Prasetya. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Tri Rama. Tt. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Mitra Pelajar.
- Victor M. Situmorang. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. (Bandung: Widya Padjajaran, 2011).

Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

SKRIPSI DAN TESIS

Erlita Ratna S, *Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Mario F. Gultom, Skripsi, *Pelaksanaan Peranan Kejaksaan dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Medan)*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011.

Neli Ernawati, *Analisis Peran Kejaksaan dalam Penuntutan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2010.

Okky Riza Wijayanto, *Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjarnegara*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi Lainnya

Laporan Akuntabilitas Kinerja, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2016.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 J.6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi
Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum

Di
Samata-Gowa

Assalamu alaihim Wa. Wa.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KURNIA DS
NIM : 10500113088
Semester/Kipl : VII / (Tujuh) B
Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

1. Peranan Satgas Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi (Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan).
2. Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus perkara korupsi (Studi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan).
3. Pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaihim Wa. Wa.

Samata, 15 Desember 2016

Mengetahui,
Penasehat Akademik

Pemohon,

(Istiqamah, SH.,MH.)
NIP:196801201995032001

(KURNIA DS)
NIM : 10500113088

31/12/16

Kurnia Yussulda

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING

JUDUL SKRIPSI / MASALAH	HARI / TANGGAL	MENYETUJUI SEKRETARIS JURUSAN
RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimanakah peranan satgas kejaksaan tinggi sulawesi selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi 2. Apa yang menghambat satgas kejaksaan tinggi sulawesi selatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi JUDUL SKRIPSI Peranan satgas kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi (Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)	31/12/16 	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : Tahun 2017
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. Rahman syamsuddin, SH., MH
2. Ashar Sinelele, SH., MH

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Kurnia DS
N I M : 10500113088
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Peranan SATGAS Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana (Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan) "

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
pada tanggal : 20 Januari 2017





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Siti Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Siti Alauddin No. 36 Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

Nomor : /SLI/PP.00.9/ 01 /2017
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi

An. Kurnia DS / 10500113088

Kepada Yth:

1. Rahman Syamsuddin., SH., M.H. Sebagai Pembimbing I
2. Ashar Sinelele., SH., MH. Sebagai Pembimbing II

Di-

Samata

Bersama ini kami mengundang bapak/ibu/saudara, untuk menghadiri *Seminar* dan melaksanakan serta bertindak selaku *Pembimbing* pada *Seminar Draft Skripsi*, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Januari 2017
Waktu : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Jurusan Ilmu Hukum Fak. Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : " Peranan SATGAS Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)"

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terimakasih.

Samata, 23 Januari 2017

Wassalam,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum,




Bismillah, SH., MH
NIP. 196801120 199503 2 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI

*"Peranan Satuan Tugas Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan"*

Disusun dan diajukan Oleh :


Kurnia Ds

NIM: 10500113088

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan
penulisan skripsi

Pada tanggal : 30 Januari 2017

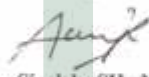
DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I



Rahman Syamsuddin, SH., M.H
NIP. 198212072009011010

Pembimbing II



Ashar Sinelele, SH., M.H
NIP. 19690717 201411 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Istiqamah SH., M.H.

NIP. 19610404 199303 1 005

Mengesahkan,

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar




Prof. Dr. Durrusalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 195704141986031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/01/2017
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Samata, 1 Februari 2017

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan
Cq. Kepala UPT P2T BKPM Prov. Sul-Sel

Di-
Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang
tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: Kurnia DS
N I M	: 10500113088
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: BTN Ranggong Blok A11 No.4 Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

**"Peranan Satuan Tugas Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan
Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan"**

Dengan dosen pembimbing :

1. Rahman Syamsuddin., SH.M.H
2. Ashar Sinelele., SH.,M.H

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang
bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan
Tinggi Sulawesi Selatan terhitung mulai tanggal 06 Februari 2017 s/d 06 Maret
2017.

Demikian harapan kami dan terimakasih.
Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 982/S.01P/P2T/02/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syarifah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : 853/Si.1/PP.00.9/01/2017 tanggal 01 Februari 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneiti dibawah ini:

Nama : KURNIA DS
Nomor Pokok : 10500113068
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERANAN SATUAN TUGAS KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dan : Tgl. 06 Februari s/d 06 Maret 2017

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 02 Februari 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth.
1. Dekan Fak. Syarifah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN M A K A S S A R

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : B- 264 /R.4.2/Cp.2/05/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD YANI, S.H.,M.H.
Nip : 19630502 198903 1 002
Pangkat : Jaksa Utama Pratama (IV/b)
Jabatan : Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : KURNIA DS
N I M : 10500113086
Program : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

telah melakukan penelitian/pengambilan data dengan Judul Penelitian "PERANAN SATUAN
TUGAS KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN" bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Mei 2017

AN. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
ASISTEN PEMBINAAN

AKHMAD YANI, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19630502 198903 1 002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 63 TELP: 864923-864924
MAKASSAR 864928-864931

MEMO

Yth
Dan

KURNIA DS

Lulus Menengah 1H

Samarata 1-8-2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 1083 Tahun 2017

TENTANG
PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 02 Agustus 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden RI, Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 262 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
- Pertama** : Menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kedua** : Tugas Panitia mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : Tugas Penguji melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Koempat** : Tugas Panitia dan Penguji dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Kesenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Samata
02 Agustus 2017

Dr. Dr. Nurussalam Syamsuddin, M.Ag

lampiran:

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1003 TAHUN 2017**

**TENTANG
PANTIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**

No	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KETUA/SEK/ANG.
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH 03	MKDUDIS 04	MKKP 05	
1	Kurnia DS 10500113088	Prof. Dr. H. A. Qadri Gassing, HT, M.S	Dr. H. Abd. Wahid Huddate, Lc., M.HI	Dr. Hamsir, M.Hum	Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag Mojahidah, S.E Nurhayati Wahid



Sumarta, 02 Agustus 2017
Prof. Dr. H. Samsudin, M.Ag
19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi Saudara **Kurnia DS**, NIM : 10500113088, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi berjudul, "Peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan", memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 28 Juli 2017



Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.

NIP: 19821207 200901 1 010



Ashar Sinilele, S.H., M.H.

NIP: 19690717 201411 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 1068 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
 : Nama : Kurnia DS
 : N I M : 10500113088
 : Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
 : Hari/Tanggal : Jum'at/ 04 Agustus 2017
 : Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
 : Judul : "Peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Dalam
 Pengkungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada
 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
 Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H
 Penguji I : Dr. Hamsir M. Hum
 Penguji II : St/Nurjannah, S.H., M.H
 Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
 2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil /Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNSP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 01 Agustus 2017





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Lomp. No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor
Sifat
Lamp
Hal

SI.1/PP.00.98/572017
Penting

Samata, 01 Agustus 2017

UNDANGAN SEMINAR HASIL

Ngada

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
2. Istiqamah, S.H., M.H (Sekretaris)
3. Dr. Hamsir M.Hum (Penguji I)
4. St. Nurjannah, S.H., M.H (Penguji II)
5. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H (Pembimbing I)
6. Azhar Sinilele, S.H., M.H (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Kurnia DS
N I M : 10500113088
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 4 Agustus 2017
Waktu : Pukul 10.00 - 11.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

DAFTAR HADIR UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

Nama : Kurnia, DS

N I M : 10500113088

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Peranan Satuan tugas Khusus Kejaksaan Dalam Pengungkapan
Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Selatan"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	Ketua	1.
2.	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.	Sekretaris	2.
3.	Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	Pembimbing	3.
4.	Azhar Sinilele, S.H, M.H	Pembimbing	4.
5.	Dr. Hamsir, M.Hum.	Penguji	5.
6.	St. Nurjannah, S.H, M.H.	Penguji	6.
7.	Mujahidah, S.E.	Pelaksana	7.
8.	Nurhayati Wahid	Pelaksana	8.
9.	Kurnia, DS	Mahasiswa	9.

Samata, 24 Agustus 2017

Ketua Panitia

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP : 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 1200 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH /SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** :
- Surat Permohonan :
 - Nama : Kurnia DS
 - N I M : 10500113088
 - Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
 - Hari/Tanggal : Kamis / 24 Agustus 2017
 - Pribul : Ujian Munaqasyah/Skrpsi
 - Judul : "Peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan"
- Menimbang** :
- a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skrpsi;
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 - c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Membentuk Panitia dan Penguji Munaqasyah/Skrpsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
 - Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 - Sekretaris : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag
 - Penguji I : Dr. Hamsir, M. Hum
 - Penguji II : St. Nurjannah, S.H., M.H
 - Pelaksana : 1. Mujahidah, S.E
2. Nurhayati Wahid
- Kedua** :
- Ketiga** :
- Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skrpsi
 - Segala biaya yang timbul akibat diberikannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keempat** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Samata
22 Agustus 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin M. Ag



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax: 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yazid, Lingsi No. 36 Samata/Sungguminasa - Gowa Telp: 841879 Fax 8221400

Nomor : 244/Sl.I/PP.00.9/2017
Sifat : Penting
Lamp :
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Sumata, 22 Agustus 2017

Kepada

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
2. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. (Sekretaris)
3. Dr. Hamsir, M.Hum (Penguji I)
4. St. Nurjannah, S.H., M.H (Penguji II)
5. Rahman Syamsuddin, S.H.M.H (Pembimbing I)
6. Azhar Sinilele, S.H., M.H (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi Atas Nama :

Nama : Kurnia DS
N I M : 10500113088
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i pada Ujian Munaqasyah/Skripsi, insya Allah dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2017
Waktu : Pukul 11.00-12.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“Peranan Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan”** bernama lengkap Kurnia DS, Nim :10500113088, Anak Kedua dari Dua bersaudara dari pasangan Aiptu Ambo Samang dan Hadina.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 224 Pammana pada tahun 2002-2007, kemudian Penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Pammana 2007-2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Pammana Kabupaten Wajo pada tahun 2010-2013. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SBM-PTAIN) dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum hingga tahun 2017.